

***Collaborative Governance* Dalam Rangka Pemulihan dan Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Ciwaluh**

Siti Wulandari¹, Muhammad Husein Maruapey^{2*}

¹² Universitas Djuanda Bogor

¹² Jagorawi Toll Rd No.1, Ciawi, Bogor Regency, West Java 16720

email: sitiwulandari28@unida.ac.id¹, maruapey.husein@unida.ac.id^{2*}

Abstract

COVID-19 is a pandemic disease that has infected many cities in Indonesia, the impact caused by the spread of COVID-19 involves many aspects including economic, social, cultural, tourism and many more. This study aims to determine Collaborative Governance in Developing Educational Tourism in Ciwaluh Village, Cigombong District, Bogor Regency. The formulation of the problem in this study is "How is Collaborative Governance in Developing Educational Tourism in Ciwaluh Village, Cigombong District, Bogor Regency?" This type of research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results of the study showed that in the collaborative process which had been carried out quite well in developing educational tourism in Ciwaluh Village, Cigombong District, Bogor Regency. The stages in the collaborative governance process (1) face to face in developing educational tourism have involved the government, community and managers by holding meetings directly in the form of a deliberative forum. (2) Trust building or building trust with a training in human resource development and providing trash bins in tourist sites. (3) Commitment to process or commitment to the collaborative process in developing educational tourism has involved the community and government in the development process (4) shared understanding to assess the extent of the collaborative process produced in developing educational tourism, namely there is a guidance forum for managers, provision of control or tourist guardian to assist in securing education tourism and procuring tourist attractions.

Keywords: Collaborative Governance; Educational; Tourism;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa di Desa Ciwaluh Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Desa Ciwaluh Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor?" Tipe penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi Desa Ciwaluh Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance (1) face to face dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah dilokasi wisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) share Understanding untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata.

Keywords: Kolaborasi Pemerintah; Wisata; Edukasi;

*)Penulis Korespondensi

E-mail : maruapey.husein@unida.ac.id

Pembahasan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia di tahun 2020 membuat terhentinya sektor pariwisata tidak hanya terjadi di jenis wisata belanja dan wisata kuliner yang, tetapi juga terhadap jenis wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Bogor. Diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu saja membuat kerugian kepada pihak sector pariwisata.

Pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang perlu dikembangkan, hal ini sesuai pernyataan T. Christie and D. Elizabeth Crompton dalam (Kurniawan, 2013). bahwa Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan

yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa.

Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan budaya dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sektor pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi disekitar area wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 bahwa kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sebuah kerjasama atau dikenal dengan collaborative governance antara pemerintah daerah yang terkait terkhususnya dinas kebudayaan dan pariwisata didaerah tersebut dengan masyarakat setempat agar dapat memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, hal ini merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional dengan daerah lain dan juga memulihkan sektor pariwisata di masa pandemi ini.

Hamparan sawah, bukit-bukit hijau, dan air sungai yang jernih merupakan tanda masih terawat keasrian alam Ciwaluh. Sungai yang jernih ini dijadikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut profil Desa Wates Jaya (2014), mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Wates Jaya adalah petani (74.21%) dan buruh industri (11.89%). Kampung yang diapit oleh 2 gunung (Gede Pangrango dan Salak). Kondisi lingkungan, sarana dan prasarana objek-objek wisata di Ciwaluh masih kurang memadai, serta daya tarik objek wisata masih relative belum banyak dikunjungi wisatawan. mancanegara, diperlukan adanya perhatian yang mendalam dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan bisa memberikan hasil yang optimal dan menguntungkan bagi masyarakat lokal. Daerah harus melakukan inovasi, kreasi dan pengembangan terhadap potensi pariwisata dengan mencari dan menciptakan peluang baru terhadap produk pariwisata yang diunggulkan. Beberapa pengelola mulai berinisiatif untuk menyajikan konsep wisata yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa objek wisata yang ada di Kampung Wisata Ciwaluh, diantaranya: Bumi Perkemahan Ciawitali, Air Terjun Ciawitali, Air Terjun Cisadane dan Air Terjun Cikaweni. Selain objek wisata, Kampung Wisata Ciwaluh juga memiliki program pendidikan lingkungan hidup dan outbond. Program yang bisa dinikmati di Kampung Wisata Ciwaluh, diantaranya: REPLING [Rute Pendidikan Lingkungan], Piknik Kopi, Trekking dan Tubbing.

Untuk itu Collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Collaborative Governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal senada juga diungkapkan oleh Holzer dalam (Arrozaaq 2016) yang menyatakan bahwa Collaborative Governance adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. Collaborative Governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan Collaborative Governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain (Sudarmo dan Mutiarawati, 2017).

Pilihan untuk mendorong berkembangnya kepariwisataan dapat timbul karena diyakini akan adanya kemanfaatan dari berkembangnya pariwisata. Secara teoritis maka dapat dilihat bahwa manfaat dan dampak pembangunan pariwisata yang ditinjau setidaknya dari empat sudut pandang yang meliputi manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, manfaat dalam berbangsa dan bernegara, serta manfaat bagi lingkungan dalam (Sedarmayanti, 2015). Dengan dasar ini maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan wisata yang ada di Desa Ciwaluh terutama wisata edukasi. Mengapa dikembangkan pariwisata pada suatu daerah baik secara lokal, regional maupun internasional. Pertama, yang disebutnya sebagai alasan utama sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Alasan kedua menurutnya ialah, pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis, seperti memelihara adat istiadat, bangunan-bangunan kuno, kesenian daerah serta membuat suasana yang nyaman, bersih dan aman. Terakhir atau yang ketiga, adalah untuk menghilangkan kepicikan berfikir, dan mengurangi salah pengertian (Yoeti, 2008).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menjawab fenomena tentang apa yang dialami oleh masyarakat. Tipe penelitian adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Teknik Pengumpulan data menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Data sebagai sumber dasar analisis dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (*documentary study*) yang mana berbagai data yang dianggap relevan dengan penelitian yang tengah di lakukan bersumber baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web dan sumber referensi lainnya. Data yang terkumpul akan di uji keabsahannya melalui mekanisme triangulasi sumber (Hilman, Y. A., & Arifin, S. 2020).

Hasil dan Pembahasan

Dampak COVID-19 Terhadap Sektor Pariwisata

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor yang salah satu aturannya melarang kegiatan pariwisata di satu sisi harus didukung guna menanggulangi penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri memberikan kerugian kepada pariwisata itu sendiri yang mana semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha sampai dengan pekerja di sektor pariwisata merasakan kerugian tersebut. Untuk di Desa Ciwaluh sendiri perlunya *collaborative governance* itu sendiri untuk mengembangkan wisata edukasi untuk memberikan pengetahuan untuk para wisatawan karena terjun langsung ke alam, tentunya dengan protokol kesehatan 5M. Pengembangan wisata edukasi juga berdampak kepada masyarakat sekitar karena bisa memperbaiki ekonomi warga sekitar desa Ciwaluh.

Upaya pemulihan pariwisata pasca wabah COVID-19 di Desa Ciwaluh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi para pelaku usaha sebagai pihak yang langsung mengelola berbagai jenis usaha pariwisata memiliki peran yang penting. Kontribusi para pelaku usaha dalam pemulihan pariwisata akan dapat menjadi indikator keberlangsungan usaha pariwisata pasca wabah COVID-19. Pertama, upaya menyusun kembali rencana usaha pariwisata yang terdampak wabah COVID-19, Kedua, upaya re-manajemen sumber daya manusia hal ini terkait dengan seberapa efektif sumber daya manusia yang ada mampu mendorong pengembangan usaha pariwisata hingga dapat pulih dalam waktu yang cepat.

Usaha terakhir yang harus ditempuh para pelaku usaha pariwisata agar dapat memulihkan pariwisata di Desa Ciwaluh yaitu dengan melakukan promosi baik secara langsung kepada wisatawan seperti memberikan kegiatan eksklusif maupun berupa promosi tidak langsung seperti iklan di media cetak dan elektronik mengenai keunggulan jenis wisata yang ada pasca wabah COVID-19. Promosi yang dilakukan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat berwisata yang diharapkan akan mendatangkan banyak wisatawan ke Desa Ciwaluh dan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease secara langsung akan berimplikasi kepada pengembalian kondisi pariwisata kepada kondisi semula seperti sebelum adanya wabah COVID-19. Tentunya dengan pemulihan dan pengembangan wisata edukasi ini bisa membuat masyarakat tertarik dengan program ini dan juga bisa mengembalikan ekonomi masyarakat sekitar Desa Ciwaluh.

Proses kolaborasi menurut Ansell and Gash (2008) yaitu :

- a. *Face to face Collaborative governance* didasarkan pada face to face antara pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan fokus pada kerahmahtamaan. Dialog secara langsung diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Face to face adalah sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sekitar objek wisata dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah sehingga terjadi kerjasama atau kolaborasi yang baik dalam pengembangan wisata edukasi ini sehingga tujuan dari dialog untuk menyatukan sebuah pendapat dari berbagai pihak dapat diwujudkan. Wisata edukasi ini dijalankan oleh kelompok anak muda Ciwaluh yang dinamai dengan *Community based ecotourism*.
- b. *Trust building* merupakan suatu kepercayaan harus dibangun dengan sangat baik antara pemerintah, masyarakat dan juga pengelola terutama dari masyarakat karena pada awal mula perencanaan pembangunan wisata edukasi ini masyarakat belum sepenuhnya memberikan ijin terkait dengan hasil sumber daya alam dan juga lahan menjadi tempat pembangunannya akan tetapi dengan adanya sebuah musyawarah secara langsung dan juga penjelasan mengenai berbagai manfaat yang akan didapatkan maka masyarakat memberikan kepercayaan penuh untuk pembangunan wisata tersebut kepada pengelola. Kemudian dari pemerintah telah memberikan kepercayaan untuk pengelola dengan mengadakan pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan beberapa tempat sampah dilokasi wisata. Maka diharapkan *collaborative governance* ini diharapkan bisa memulihkan sector wisata edukasi yang ada di Desa Ciwaluh ini dan membuat SDM nya mempunyai wawasan luas.
- c. *Commitment to process*, Komitmen terkait motivasi berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Sarana, prasarana dan SDM Akan tetapi dalam proses pengembangannya telah melibatkan masyarakat untuk mewujudkan,keamanan, kebersihan dan ketertiban. Kemudian pemerintah telah melakukan sosialisasi, membina, dan juga melakukan promosi objek wisata edukasi ini.
- d. *Share understanding*, Untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan antara dinas kebudayaan dan pariwisata dengan komunitas rumah pohon dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Ciwaluh dalam proses pengembangan wisata edukasi ini sudah berjalan dengan baik karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin seperti mengadakan sosialisasi pelatihan SDM, penyediaan tong sampah dan pamong wisata untuk keamanan lokasi wisata. Meskipun masih ada kekurangan akan tetapi kekurangan tidak menjadi hambatan untuk pengembangannya karena selama proses kolaborasi ini terdapat forum sosialisasi maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan promosi yang dilakukan juga sudah sangat baik hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu bertambah yang menandakan bahwa wisata edukasi ini sudah dikenal dimana-mana.

Kesimpulan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari wabah COVID-19 yang ada di Kota Bandung. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Kota Bandung berimplikasi langsung kepada pariwisata berupa berhentinya aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut memberikan kerugian baik kepada pelaku usaha pariwisata, pekerja di bidang pariwisata dan masyarakat pada umumnya. Meskipun wabah COVID-19 masih berlangsung, akan tetapi harus pula direncanakan sedari awal mengenai proses penyusunan kebijakan pemulihan pariwisata agar nantinya pariwisata di Desa Ciwaluh dapat kembali seperti sebelum wabah COVID-19. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Ciwaluh, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari bab pembahasan sebagai berikut: *Face to face* dalam proses collaborative governance melibatkan pemerintah, masyarakat sekitar objek wisata dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah untuk membahas perencanaan pengembangan wisata edukasi. *Trust building* atau membangun kepercayaan yang dilakukan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan juga dalam kebersihan menyediakan beberapa tempat sampah di lokasi wisata. *Commitment to process* atau komitmen terhadap proses kolaborasi telah melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban. Kemudian melibatkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan, memantau, membina dan melakukan promosi. *Shared understanding* untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan yaitu terdapat forum sosialisasi maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, menyediakan pamong wisata untuk mengontrol keamanan wisata. Rekomendasi yang kami berikan adalah bagaimana memperkuat sektor wisata ketika dalam kondisi pandemic atau bencana, pola-pola kolaborasi bisa menjadi solusi untuk pengembangan keadaan genting seperti itu.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Universitas Djuanda Bogor atas supor dan dukungannya.

Daftar Pustaka

- Arrozaaq, D.L.C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minopolitan Di Kabupaten Sidoarjo). [Http://Repositor.Unair.Ac.Id/67685](http://Repositor.Unair.Ac.Id/67685). Diakses Pada Tanggal 25 September 2018.
- Ansell, C & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 1-29.
- Carter, W. Nick. (2008). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Mandaluyong: Asian Development Bank.
- Hadji, Kuswan. Dkk. (2017). Potensi Dan Pengembangan Wahana Obyek Wisata Alam Sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Keluarga Di Kabupaten Magelang. [Http://Journal.Ummgl.Ac.Id/Index.Php/Urecol/Article/Download/1014/751](http://Journal.Ummgl.Ac.Id/Index.Php/Urecol/Article/Download/1014/751). Diakses Pada Tanggal 19 September 2018.
- Hilman, Y. A., & Arifin, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata œBukit Sebrangœ Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 36-49.
- Kurniawan, Fandy. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). [Http://AdministrasiPublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/10](http://AdministrasiPublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/10). Diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2018.
- Priambodo, Stefanus Arie. (2009). *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.

Sedarmayanti. (2015). Membangun Kebudayaan Dan Pariwisata. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Diakses Pada Tanggal 19 September 2018.

Sudarmo Dan Tika Mutiarawati, (2017). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No 2. Diakses Pada Tanggal 19 September 2018.

Yoeti, O. A. (2008). Ekonomi Pariwisata. Introduksi, Informasi, Dan Implementasi. Jakarta: Kompas. Diakses Pada Tanggal 23 September 2018.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Yang Menyatakan COVID-19 Sebagai Bencana Non-Alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.